

AUDIT PIUTANG PELANGGAN LISTRIK YANG DIKELOLA BUMD KABUPATEN MUSI BANYUASIN

I r s a n

Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email: irsan23juni@gmail.com

ABSTRAK

Piutang usaha yang dapat dirubah bentuknya menjadi dana segar (fresh money) akan memberikan kontribusi yang besar terhadap performa kas sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lancar. Di saat adanya ketimpangan dan ketidakwajaran maka diperlukan audit/pemeriksaan oleh pihak yang berkompeten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah struktur pengendalian piutang pelanggan di PT. Muba Electric Power sudah berjalan dengan efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMD bidang ketenagalistrikan yang dikelola oleh PT. Muba Electric Power tersebut belum melakukan pengendalian piutang pelanggan dengan baik dimana perusahaan tidak melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas staf bagian Administrasi Pelanggan atas pemasangan sambungan baru dan tambah daya. Perusahaan tidak mencatat jurnal pengakuan piutang denda keterlambatan, serta tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Piutang Pelanggan. Dari segi mitra kerja, pencatat meter (cater) selain menyerahkan rekap hasil pencatatan meter tidak melaporkan secara tertulis kejadian-kejadian di lapangan seperti adanya KWH meter yang sudah dicabut atau ada pelanggan yang minta KWH meternya dicabut karena tidak mau bayar. Penagih Rekening tidak membuat perincian tertulis jumlah uang yang disetor ke rekening bank PT. MEP berapa jumlah tagihan yang diterima dan terdiri tagihan dari bulan berjalan atau tunggakan bulan sebelumnya, serta berapa jumlah denda yang diterima. Sehingga adanya perbedaan data laporan piutang pelanggan per 31 Desember 2015 antara bagian akuntansi dengan bagian niaga tanpa bisa dijelaskan. Akumulasi piutang pelanggan tahun 2011 sampai dengan 2015 pun tersisa masih sangat tinggi yaitu sebesar 15,97 milyar rupiah.

Kata kunci : Audit, Piutang Pelanggan.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Timbulnya Piutang usaha merupakan akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Pengelolaan piutang usaha yang baik dan efektif sangat diperlukan untuk menciptakan performa kemampuan kas yang dibutuhkan bagi pembiayaan perusahaan karena penerimaan yang tidak sebanding dengan keperluan dana akan menyulitkan pelaksanaan program-program kerja yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Sistem pengendalian piutang usaha yang baik adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan, disamping upaya untuk menekan biaya-biaya yang timbul berkaitan akibat pengelolaan piutang usaha seperti biaya penyisihan piutang, biaya penagihan piutang dan

penghapusan piutang. Selain itu sistem pengendalian pada perusahaan digunakan untuk melindungi aset perusahaan dari tindakan penyalahgunaan (Hery, 2013:159).

Dikarenakan piutang usaha memberikan kontribusi yang besar terhadap performa kas, maka pengendalian dan pengelolaan piutang haruslah baik. Namun di saat laporan piutang menyajikan data yang dirasa timpang (anomali), maka manajemen perlu mencari tahu penyebab adanya ketimpangan tersebut. Untuk itu dilakukan audit yang merupakan proses pengumpulan serta pengevaluasian bahan bukti, tentang informasi yang dapat diukur, mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang berkompeten dan independen, untuk dapat menentukan serta melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens, et al, 2012:7). Dalam hal ini audit atau pemeriksaan terhadap piutang merupakan audit khusus karena luas pemeriksaannya hanya terbatas pada piutang usaha. Pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan melainkan hanya atas pos atau masalah tertentu yang diperiksa (Agoes, 2008).

Permasalahan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Musi Banyuasin yang dikelola oleh PT. Muba Electric Power (PT. MEP) dengan bidang usahanya ketenagalistrikan adalah tunggakan piutang pelanggan listrik seperti rumah tangga, gedung pemerintahan, dan industri. Pada laporan keuangan *unaudit* tahun 2015, saldo piutang usaha menunjukkan angka sebesar Rp 16.929.532.658, sedangkan saldo piutang usaha menurut daftar/bagian Niaga menunjukkan angka Rp 15.008.560.915, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.920.971.743. Kurangnya pengendalian terhadap piutang usaha/pelanggan ini mengakibatkan kerugian yang cukup material. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahas tema tersebut mengenai “Audit Piutang Pelanggan Listrik Yang Dikelola BUMD Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2.Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul dan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apakah struktur pengendalian piutang yang terdapat pada PT. Muba Electric Power Sekayu telah berjalan dengan baik ?
2. Apakah saldo piutang dagang yang tercantum pada neraca per 31 Desember 2015 telah menunjukkan saldo yang sewajarnya ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Audit

Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksinkronan laporan yang dibuat, baik hal yang disengaja maupun tidak. Proses audit dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang berkopeten di bidang tersebut yang disebut auditor. Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit harus mempunyai pedoman dan langkah-langkah kegiatan kerja sehingga didapatkan hasil pemeriksaan yang akurat dan optimal.

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukirno Agus, 2004:3). Audit juga merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014:9).

Sedangkan William (2003:8) menyatakan bahwa audit adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.

2.2.Pengertian Piutang

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan tidak dapat menghindari yang namanya penjualan secara kredit, penjualan kredit ini menimbulkan suatu piutang yang memiliki tempo dan jangka waktu dalam proses pembayarannya.

Menurut Van Horne dan Wachowicz, (2005) piutang dagang adalah sejumlah uang yang dialihkan kepemilikannya kepada suatu perusahaan oleh para pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit. PSAK No. 9 (Revisi 2009) menjelaskan piutang adalah menurut sumber terjadinya, piutang digolongkan dalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan sebagai piutang lain-lain.

Piutang usaha dan piutang lain lain yang diharapkan dapat tertagih dalam satu tahun atau siklus usaha normal, diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Sedangkan Warren dan Fess (2005:404) menyatakan bahwa piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan atau organisasi lainnya”.

2.3. Prosedur Audit Piutang Usaha

Prosedur audit piutang usaha dilakukan untuk mendapatkan bukti audit antara lain:

1). Pemahaman Sistem Pengendalian Intern, meliputi pertimbangan lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, didapatkan melalui a). mengajukan pertanyaan kepada manajemen, pengawas dan staff. b). mempelajari struktur organisasi. c). menelaah deskripsi tugas.

2) *Compliance Test*, untuk melakukan test terhadap bukti (Agoes (2004:97) *compliance test* terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat oleh perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen (Agoes (2004:97). Dalam melaksanakan *compliance test* auditor harus memperhatikan hal-hal berikut: a). kelengkapan bukti pendukung. b). kebenaran perhitungan matematis. c). otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. d). kebenaran nomor perkiraan yang didebet atau dikredit. e). kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar.

3) *Substantive Test*, merupakan tahap pembuktian kewajaran saldo-saldo laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan dalam *substantive test*, menurut Agoes (2004:176), adalah sebagai berikut a). pelajari dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan. b). buat *Top Schedule* dan *Supporting Schedule* piutang pertanggal neraca. c). minta *aging shedule* dari piutang usaha pertanggal neraca yang antara lain menunjukkan nama pelanggan (*customer*), saldo piutang, umur piutang dan kalau bisa *subsequent collections*-nya. d). periksa *mathematical accuracy*-nya dan check individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. e). *test check* umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan *sales invoice*. f). kirimkan konfirmasi piutang. g). periksa *subsequent collections* dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan (*audit field work*), perhatikan bahwa yang dicatat sebagai *subsequent collections* hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. h). periksa apakah ada wesel tagih (*notes receivable*) yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya *contingent*

liability. i). periksa dasar penentuan *allowance for bad debts* dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil. j). test *sales cut-of* dengan jalan memeriksa *sales invoice*, *credit note* dan lain-lain, lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca, periksa apakah barang-barang yang dijual melalui *invoice* sebelum tanggal neraca, sudah dikirim per tanggal neraca, kalau belum cari tahu alasannya, periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa, yang dibatalkan dalam periode berikutnya. k). periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan *correspondence file* untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. l).periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia/SAK. m).tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan dengan pengelola PT. Muba Electric Power (PT. MEP) Jalan Raya Merdeka Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik dalam pengambilan data adalah data primer, yaitu pengumpulan data dengan cara survey, observasi dan dokumentasi.

3.4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data nonstatistik. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah menganalisa unsur-unsur sistem pengendalian intern piutang pelanggan PT. Muba Electric Power yang meliputi :

- a. Analisis struktur organisasi piutang, sistem otorisasi wewenang dan pencatatan secara internal perusahaan.
- b. Analisis sistem otorisasi wewenang dan pencatatan oleh pihak-pihak terkait (pencatat meter dan penagih).
- c. Analisis saldo piutang pelanggan dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan pengujian dokumen perusahaan serta prosedur analisis dan wawancara kepada manajemen perusahaan dan pihak-pihak terkait, penulis menemukan kelemahan-kelemahan dalam penanganan piutang usaha yang dilakukan manajemen perusahaan yang mengakibatkan hak dan eksistensi Piutang usaha perusahaan menjadi tidak terkontrol (*uncontrolled*), sehingga menimbulkan kerawanan atas kebocoran atau hilangnya aset perusahaan.

4.1. Analisis Struktur Organisasi Piutang, Sistem Otorisasi Wewenang dan Pencatatan Secara Internal Perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan adanya hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap unit yang ada di dalam suatu perusahaan dan menjadi landasan dalam melakukan suatu pelaksanaan tanggung jawab fungsional secara tegas, dengan demikian setiap karyawan akan mengetahui apa tugas dan kepada siapa ia harus bertanggung jawab sehingga terbentuklah suatu sistem yang baik dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, manajemen tidak melaksanakan pengawasan dan pengontrolan (*control*) terhadap aktivitas staf bagian Administrasi Pelanggan atas pemasangan sambungan baru yang tidak melaporkan kegiatannya dan tidak ada koordinasi dengan bagian Niaga sehingga bagian Niaga tidak menerbitkan Rekening Pelanggan lebih dari 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pencatat meter dan penagih dan memperoleh jawaban bahwa sebanyak 14 pelanggan di desa Berlian Makmur, kecamatan Sungai Lilin yang sudah dipasang KWH meter setahun lebih belum diterbitkan rekeningnya/ belum masuk bodrel (rekap tagihan) oleh bagian Niaga. Akibat dari kelalian ini, perusahaan dirugikan karena tidak menerima pendapatan perusahaan selama 1 (satu) tahun lebih dari banyak KWH terpasang yang tidak tertagih.

Manajemen tidak melaksanakan pengawasan dan pengontrolan (*control*) terhadap aktivitas staf bagian Administrasi Pelanggan atas penambahan daya pelanggan yang tidak

melaporkan kegiatannya atau tidak ada koordinasi dengan bagian Niaga sehingga bagian Niaga tidak menerbitkan Rekening Pelanggan sesuai daya setelah penambahan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petugas pencatat meter diperoleh keterangan bahwa telah terdapat beberapa perubahan (penambahan) daya beberapa pelanggan, namun daftar yang dibuat untuk dasar pencatatan meter belum dirubah, demikian juga dengan Rekening yang diterbitkan masih menggunakan daya lama. Akibat dari kelalaian ini, perusahaan dirugikan tidak menerima pendapatan dari selisih perubahan daya.

Manajemen tidak mencatat jurnal pengakuan piutang denda keterlambatan pembayaran pelanggan sedangkan jika terdapat pembayaran denda yang dipungut atas kesadaran pelanggan atau inisiatif penagih, jumlah pembayaran denda yang disetor tersebut otomatis mengurangi saldo pokok total piutang pelanggan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penagih diperoleh jawaban bahwa penyetoran denda yang dibayar oleh pelanggan disetor ke perusahaan bersamaan dengan penyetoran tagihan rekening. Namun petugas penagih mengatakan bahwa tidak membuat perincian berapa jumlah pokok dan berapa jumlah denda yang disetor ke perusahaan. Akibat yang timbul dan tidak dicatatnya pengakuan piutang denda oleh manajemen dan tidak dibuatnya perincian setoran oleh petugas penagih, maka saldo piutang pelanggan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya (*understated*).

Manajemen tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Piutang Pelanggan yang menjadi landasan dan dasar operasional dan administrasi bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya secara terukur dan bertanggungjawab. SOP yang ada selama ini dalam bentuk *flow chart* yang sederhana tanpa uraian lengkap siapa yang melaksanakan, formulir apa yang digunakan, dilaporkan kepada siapa, disetujui oleh siapa, kapan *deadline* penyelesaiannya, dan apa sanksi jika tidak dijalankan. Akibat dari tidak adanya SOP tersebut, pelaksanaan pekerjaan berjalan tanpa pengendalian dan cenderung monoton dan rutinitas tanpa target yang jelas sehingga produktivitas rendah dan manajemen tidak dapat memperoleh informasi piutang pelanggan secara rinci, tepat dan akurat.

Dalam hal ketentuan pemetuan sambungan yang peraturannya telah ditetapkan terhadap para pelanggan yang telah menunggak rekening selama 3 (tiga) bulan pihak manajemen belum melaksanakannya. Banyaknya ditemukan rekening listrik yang tercatat di *bodrel* (rekap tagihan ke pelanggan) merupakan tunggakan rekening tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Hal ini wujud ketidaktegasan manajemen dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan. Akibat yang ditimbulkan dari ketidaktegasan ini, para pelanggan merasa tidak memiliki kewajiban membayar listrik dan diikuti oleh pelanggan lainnya secara masif seperti terjadi di kecamatan Tungkal Jaya dan merupakan kerugian besar bagi perusahaan.

4.2. Analisis Sistem Otorisasi Wewenang dan Pencatatan oleh pihak-pihak terkait (Pencatat Meter dan Penagih)

Pencatat Meter (cater) selain menyerahkan rekap hasil pencatatan meter tidak melaporkan secara tertulis kejadian-kejadian di lapangan seperti adanya KWH meter yang sudah dicabut atau ada pelanggan yang minta KWH meternya dicabut karena tidak mau bayar. Berdasarkan hasil wawancara beberapa pencatat meter diperoleh jawaban bahwa meskipun sudah ada KWH meter yang dicabut akan tetapi daftar pelanggan yang berasal dari PT. MEP masih mencantumkan pelanggan tersebut. Pencatat meter tidak mengetahui apakah KWH meter dicabut tersebut dilakukan oleh PT. MEP atau dicuri. Akibat yang timbul dari kehilangan atau tidak jelasnya keberadaan KWH meter tersebut, perusahaan berpotensi mengalami kerugian kehilangan aset KWH meter. Selain itu tunggakan atas pelanggan yang KWH meternya dicabut tidak mungkin dibayar oleh pelanggan.

Penagih Rekening tidak membuat perincian tertulis jumlah uang yang disetor ke rekening bank PT. MEP berapa jumlah tagihan yang diterima dan terdiri tagihan dari bulan berjalan atau tunggakan bulan sebelumnya, serta berapa jumlah denda yang diterima. Dengan demikian penagih rekening tidak memberikan informasi yang akurat dan tepat untuk administrasi pencatatan Piutang di kantor PT. MEP. Berdasarkan wawancara beberapa penagih rekening diperoleh jawaban bahwa mereka tidak mengetahui berapa tunggakan yang berada dalam pengurusannya dan mereka mengetahui adanya tunggakan dari bodrel yang dicetak setiap bulan. Kondisi ini sangat kontradiktif mengingat mereka merupakan ujung tombak yang seharusnya mengetahui adanya tunggakan rekening yang sangat banyak dan berumur lama tapi mendiamkan atau tidak berupaya membantu PT. MEP menyelesaikannya. Mereka berdalih tidak ada ketegasan dari manajemen untuk memutus sambungan pelanggan. Akibat yang timbul dari tunggakan rekening yang menumpuk dan bertambah terus dalam jumlah yang besar, PT. MEP berpotensi akan mengalami kerugian yang sangat besar dari piutang pelanggan yang tidak dapat ditagih.

4.3. Analisis Saldo Piutang

Piutang usaha dibandingkan dari berbagai sumber data per 31 Desember 2015 menunjukkan perbedaan signifikan sebagai berikut :

Saldo pada Laporan Keuangan (Neraca)	Rp 16.929.532.658
Saldo menurut daftar/rincian Bagian Niaga	<u>Rp 15.008.560.915 (-)</u>

Selisih

Rp 1.920.971.743

Atas selisih tersebut tidak dapat dijelaskan (direkonsiliasi) oleh Bagian Niaga maupun Bagian Keuangan/Akuntansi. Permasalahan selisih tersebut timbul karena tidak pernah dilakukan rekonsiliasi minimal setiap akhir bulan sehingga selisih dapat diketahui setiap akhir bulan pada saat penutupan buku (*closing*) laporan keuangan bulanan. Selisih yang terjadi juga disebabkan penanganan piutang area unit Lalan diadministrasikan tersendiri terpisah dari area lainnya.

Setelah manajemen meminta bantuan program pembuatan tagihan rekening berbasis IT kepada Multi Data Palembang (MDP), hasilnya belum memuaskan karena belum *on line* dengan *General Ledger* laporan keuangan.

Berikut perbedaan antara pengakuan pendapatan (pengakuan piutang) tahun 2014 dan 2015 menurut perhitungan manual Bagian Niaga dengan hasil program IT yang dilakukan oleh MDP. Program IT untuk rekening pelanggan ini sebagian mengentry rekening yang sudah pernah diterbitkan perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah piutang yang sebenarnya namun belum mencapai tujuan yang diharapkan.

Tahun/Bulan	Jumlah Pendapatan Menurut Bag. Niaga	Jumlah Pendapatan Menurut Hasil Program IT MDP	Selisih
Tahun 2014			
Januari	3.811.121.172	2.311.601.237	1.499.519.935)
Pebruari	3.903145.190	4.453.654.184	(550.508.994)
Maret	4.052.836.729	4.592.826.907	(539.990.178)
April	3.765.304.955	4.324.439.483	(559.134.528)
Mei	3.810.964.000	4.365.215.165	(554.251.165)
Juni	3.816.221.880	4.367.493.481	(551.271.601)
Juli	3.929`077.095	4.448.198.113	(519.121.018)
Agustus	3.857.792.185	4.460.630.763	(602.838.578)
September	3.921.482.576	4.508.974.048	(587.491.472)
Oktober	3.788.219.760	4.326.326.683	(538.106.923)
Nopember	3.877.489.135	4.390.659.383	(513.170.248)
Desember	3.733.299.720	4.232.876.648	(499.576.928)
Jumlah 2014	46.266.954.397	50.782.896.095	(4.515.941.698)
Tahun 2015			
Januari	3.901.992.556	4.443.760.724	(541.768.168)
Pebruari	4.031.383.183	4.641.874.233	(610.491.050)
Maret	4.349.865.100	4.878.400.856	(528.535.756)
April	4.072.973.011	4.590.010.851	(517.037.840)

Mei	4.221.815.390	4.763.881.615	(542.066.225)
Juni	4.293.852.444	4.700.660.015	(406.807.571)
Juli	4.465.464.829	4.814.982.870	(349.518.041)
Agustus	4.523.243.500	4.504.815.715	18.427.785
September	4.593.563.104	4.726.209.910	(132.646.806)
Oktober	4.437.063.035	4.698.994.875	(261.931.840)
Nopember	4.332.631.042	4.669.592.010	(336.960.968)
Desember	4.211.054.341	4.510.656.163	(299.601.822)
Jumlah 2015	51.434.901.535	55.943.839.837	(4.508.938.302)

Selisih yang terjadi antara jumlah yang dicatat Bagian Niaga dengan hasil program IT MDP antara lain disebabkan adanya pengakuan denda dalam perhitungan program MDP. Oleh karena kesulitan menggunakan data mana yang paling valid dan dapat diandalkan, maka penentuan besarnya piutang usaha per 31 Desember 2015 dilakukan dengan analisis matematis jumlah pendapatan yang diakui periode tahun 2012 sampai dengan periode tahun 2015 *dikurang* dengan penerimaan setoran pembayaran rekening pelanggan periode yang sama yaitu:

Pengakuan pendapatan periode 2012 s.d. 2015	Rp 175.355.327.967
Penerimaan setoran pembayaran 2012 s.d. 2015	<u>Rp 159.377.373.891 (-)</u>
Saldo Piutang 31 Desember 2015	Rp 15.977.957.076

Jumlah saldo piutang tersebut di atas tidak termasuk piutang pelanggan tahun 2011 yang datanya tidak diperoleh sehingga jika piutang tahun 2011 ada, maka diabaikan.

PT. MUBA ELECTRIC POWER							
REKAPITULASI PENJUALAN (PENDAPATAN) DAN PEMBAYARAN REKENING PERIODE 2012 S/D 2015							
DAN SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2015							
No	Bulan	2012		2013		2014	
		Pendapatan	Pembayaran	Pendapatan	Pembayaran	Pendapatan	Pembayaran
1	Januari	2.804.151.266	2.360.663.652	2.959.079.834	3.102.002.485	3.811.121.172	3.609.510.825
2	Pebruari	2.913.594.183	2.698.470.326	3.125.452.151	2.913.881.571	3.903.145.190	3.485.567.998
3	Maret	2.937.246.662	2.882.559.245	3.126.709.461	2.797.475.704	4.052.836.729	3.487.696.253
4	April	2.885.333.728	2.484.302.198	2.974.058.807	2.992.761.454	3.765.304.955	3.636.574.829
5	Mei	2.991.232.022	2.699.709.113	3.032.004.370	2.718.467.644	3.810.964.000	3.282.324.569
6	Juni	2.904.291.685	2.627.684.055	3.108.910.280	2.898.401.881	3.816.221.880	3.488.748.677
7	Juli	3.101.211.197	2.682.169.661	3.807.199.403	3.232.242.704	3.929.077.095	3.033.078.009
8	Agustus	3.095.657.802	2.639.768.741	3.795.205.875	3.497.762.016	3.857.792.185	3.270.825.912
9	September	3.206.386.407	3.127.962.278	4.080.770.765	4.206.266.863	3.921.482.576	3.588.186.142
10	Oktober	3.224.335.215	3.245.103.094	3.849.815.916	3.595.575.851	3.788.219.760	3.287.659.130
11	Nopember	3.067.804.645	2.965.602.384	3.844.901.296	3.810.592.897	3.877.489.135	3.116.287.356
12	Desember	3.045.467.774	2.845.242.015	3.732.654.291	3.659.993.022	3.773.299.720	3.470.267.358
	Jumlah	36.176.712.586	33.259.236.762	41.436.762.449	39.425.424.092	46.306.954.397	40.756.727.058

No	Bulan	2015		Total 2012 - 2015		Saldo Piutang
		Pendapatan	Pembayaran	Pendapatan	Pembayaran	
1	Januari	3.901.992.556	3.457.559.340	13.476.344.828	12.529.736.302	946.608.526
2	Pebruari	4.031.383.183	3.596.542.982	13.973.574.707	12.694.462.877	1.279.111.830
3	Maret	4.349.865.100	4.409.935.593	14.466.657.952	13.577.666.795	888.991.157
4	April	4.072.973.011	3.688.799.688	13.697.670.501	12.802.438.169	895.232.332
5	Mei	4.221.815.390	3.711.097.198	14.056.015.782	12.411.598.524	1.644.417.258
6	Juni	4.293.852.444	3.566.694.756	14.123.276.289	12.581.529.369	1.541.746.920
7	Juli	4.465.464.829	3.430.542.814	15.302.952.524	12.378.033.188	2.924.919.336
8	Agustus	4.523.243.500	4.279.046.302	15.271.899.362	13.687.402.971	1.584.496.391
9	September	4.593.563.104	3.923.289.123	15.802.202.852	14.845.704.406	956.498.446
10	Oktober	4.437.063.035	3.892.915.806	15.299.433.926	14.021.253.881	1.278.180.045
11	Nopember	4.332.631.042	3.611.163.224	15.122.826.118	13.503.645.861	1.619.180.257
12	Desember	4.211.054.341	4.368.399.153	14.762.476.126	14.343.901.548	418.574.578
	Jumlah	51.434.901.535	45.935.985.979	175.355.330.967	159.377.373.891	15.977.957.076

RINCIAN PIUTANG USAHA

TIAP KANTOR JAGA

No.	Nama Kantor Jaga	saldo Piutang per 31-12-2015
1	Lais	1.927.748.702
2	Keluang	2.082.192.874
3	Plakat Tinggi	1.538.319.177
4	Sungai Keruh	776.797.970
5	Bayung Lencir	2.794.939.174
6	Sungai Lilin	3.926.452.307
7	Sido Muktii	617.489.299
8	Lalan	1.514.024.645
9	Sekayu	799.992.926
	Jumlah	15.977.957.074

5. KESIMPULAN DAN SARAN/ REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Pada bagian terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yang merupakan kelemahan-kelemahan dari manajemen dan mitra pencatat meter dan penagih adalah sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengontrolan (*control*) terhadap aktivitas staf bagian Administrasi Pelanggan atas pemasangan sambungan baru yang tidak melaporkan kegiatannya dan tidak ada koordinasi dengan bagian Niaga sehingga bagian Niaga Tidak menerbitkan Rekening Pelanggan lebih dari 1 (satu) tahun
2. Tidak melaksanakan pengawasan dan pengontrolan (*control*) terhadap aktivitas staf bagian Administrasi Pelanggan atas penambahan daya pelanggan yang tidak melaporkan kegiatan nya atau tidak ada koordinasi dengan bagian Niaga sehingga bagian Niaga tidak menerbitkan Rekening Pelanggan sesuai daya setelah penambahan.
3. Tidak mencatat jurnal pengakuan piutang denda keterlambatan pembayaran pelanggan sedangkan jika terdapat pembayaran denda yang dipungut atas kesadaran pelanggan atau inisiatif penagih, jumlah pembayaran denda yang disetor tersebut otomatis mengurangi saldo pokok total piutang pelanggan.
4. Tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Piutang Pelanggan yang menjadi landasan dan dasar operasional dan administrasi bagi para pelaksana dalam menjalankan tugasnya secara terukur dan bertanggungjawab.
5. Pemutusan sambungan yang peraturannya telah ditetapkan terhadap para pelanggan yang telah menunggak rekening selama 3 (tiga) bulan pihak manajemen belum melaksanakannya.
6. Pencatat meter (cater) selain menyerahkan rekap hasil pencatatan meter tidak melaporkan secara tertulis kejadian-kejadian di lapangan seperti adanya KWH meter yang sudah dicabut atau ada pelanggan yang minta KWH meternya dicabut karena tidak mau bayar.
7. Penagih Rekening tidak membuat perincian tertulis jumlah uang yang disetor ke rekening bank PT. MEP berapa jumlah tagihan yang diterima dan terdiri tagihan dari bulan berjalan atau tunggakan bulan sebelumnya, serta berapa jumlah denda yang

diterima. Dengan demikian penagih rekening tidak memberikan informasi yang akurat dan tepat untuk administrasi pencatatan Piutang di kantor PT. MEP

5.2. Saran/Rekomendasi

1. Agar dilakukan pemisahan petugas pencatat meter dengan petugas penagih untuk menghindari adanya kongkalikong dengan pelanggan untuk jumlah pemakaian KWH dan adanya praktek *window dressing* yaitu tagihan bulan berjalan digunakan pribadi dahulu dan uang yang telah terpakai akan ditutup dengan penerimaan tagihan bulan yang akan datang dan seterusnya.
2. Agar dibuat kebijakan sistem penyetoran tagihan pelanggan karena yang selama ini berjalan adalah penyetoran oleh petugas penagih dilakukan setiap akhir bulan atau bahkan sampai pengambilan kembali bodrel bulan yang akan datang.
3. Agar dibuat “Berita Acara Pembayaran Setoran Tagihan Pelanggan” pada saat petugas menagih menyetorkan hasil penagihan rekening dengan dibuat lampiran perhitungan setoran meliputi jumlah setoran, penerimaan setoran rekening berjalan, penerimaan setoran rekening tunggakan, sisa rekening tagihan yang belum dibayar pelanggan bulan berjalan dan bulan sebelumnya.
4. Agar daftar pelanggan yang menjadi dasar petugas pencatat meter di *up date* atau dimutakhirkan oleh Bagian Niaga dan berkoordinasi dengan Bagian Teknik termasuk data penambahan daya, mutasi atau balik nama.
5. Agar mengaktifkan penertiban pelanggan yang menunggak rekening 3 bulan atau lebih dengan tujuan *law enforcement* memutus sementara sambungan sehingga pelanggan yang nakal tidak diikuti oleh para pelanggan yang lancar.
6. Agar dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan dan Piutang Pelanggan yang dimulai dari pemasangan baru, penambahan daya, pencatatan meter, penagihan, penyetoran, pencatatan piutang sehingga ke depan penjualan dan piutang pelanggan dan penerimaan kasnya menjadi terkontrol dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Agoes, Sukrisno. 2008. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, et al. 2012. *Auditing and Assurance Service an Integrated Approach*. Ed 14th. Pearson Education Inc: New Jersey
- Herry. 2013. *Konsep Penting Skuntansi & Auditing Yang Perlu Anda Ketahui*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK Nomor 9. Revisi 2009.
- Warren, Reeve dan Fees. 2005. *Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
- Van Horne, James C. and John M. Wachowicz. 2005. *Fundamentals of Financial: Management Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Penerjemah: Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- William F. Messier, dan Margareth Boh. 2003. *Auditing and Assurance: A Systematic Approach* (3th edition). USA : McGraw-Hill.